BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahasa dalam sistem pendidikan tidak pernah berada pada posisi netral yang sepenuhnya netral. Bahasa berfungsi untuk menyampaikan pengetahuan, tetapi dalam konteks kebijakan pendidikan bahasa juga menjadi instrumen ideologi, identitas, dan distribusi kekuasaan sosial. (Elizabeth Sherman Swing, 1980). Negara melalui kebijakan pendidikan memiliki otoritas untuk menentukan bahasa yang memperoleh legitimasi, bagaimana bahasa diposisikan dalam kurikulum, dan fungsi sosial yang dilekatkan pada bahasa tersebut (Bernard Spolsky, 2003). Posisi suatu bahasa dalam pendidikan nasional tidak hanya ditentukan oleh nilai linguistik atau pedagogisnya, tetapi juga oleh konstruksi politik, ideologi, dan kepentingan strategis yang melingkupinya (Thomas Ricento, 2000).

Bahasa dalam konteks global, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa internasional yang memiliki signifikansi pada ranah geopolitik, religius, kultural, dan ekonomis. Bahasa Arab adalah bahasa resmi di 22 negara anggota Liga Arab, salah satu dari enam bahasa resmi Persatuan Bangsa-bangsa (PBB), serta bahasa kerja di berbagai organisasi internasional (UNESCO Report, 2025). Secara global, terdapat 420 juta penutur bahasa Arab dengan proyeksi mencapai 500 juta pada tahun 2050 (S. Galan, 2026). Bahasa Arab juga memiliki peran strategis dalam diplomasi internasional, industri halal, energi, perdagangan, pariwisata, media, serta menjadi bahasa utama dalam khazanah keilmuan Islam klasik dan kontemporer (Abu-Melhim, 2014). Di era teknologi, media menjadi objek utama yang paling dipengaruhi oleh bahasa (Al-Azmeh, 2025).

Pada level nasional, Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, yaitu sekitar 231,06 juta jiwa atau 86,7% dari jumlah total penduduk dan secara proporsi penduduk ini setara dengan 11,92% dari total populasi dunia (Katadata, 2022). Bahasa Indonesia banyak diserap dari bahasa Arab berupa istilah-istilah teologis seperti adil, rakyat, musyawarah, dan lain sebagainya. Jumlah kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab diperkirakan antara 2.000 hingga 3.000 kata, yakni mewakili 10% hingga 15% dari

UIN IMAM BONJOL PADANG

total seluruh kosakata bahasa Indonesia. Tercatat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sekitar 1.037 kata, tetapi 2.750 kata serapan bahasa Indonesia dari bahasa Arab (Russell Jones, 2007). Bahasa Arab diserap menjadi bahasa Indonesia bukan tanpa alasan, akan tetapi karena kata tersebut mempunyai nilai prestise bahasa agama di masa lalu (A. Hamid et al., 2024). Walaupun demikian, karena politik bahasa Arab yang tidak kuat di Indonesia, kata-kata tersebut dijadikan sebagai kalimat moral dalam dinamika politik modern (Federspiel, 1991). Penyerapan kosakata Arab ke dalam bahasa Indonesia bukan sekadar soal linguistik, melainkan turut serta mengadopsi konsep hukum, perasaan, dan etika yang lebih kompleks (Anderson, 2006). Struktur budaya, etika, dan hukum di Indonesia secara tidak langsung merupakan bangunan yang dipengaruhi oleh bahasa Arab. Kehidupan umat Islam dan kerajaan-kerajaan Islam tumbuh subur sebelum terbentuknya negara Indonesia.

Pada masa kerajaan Islam di Indonesia, bahasa Arab pernah menjadi bahasa intelektual yang menghubungkan Indonesia dengan pusat peradaban dunia sehingga memicu reformasi pemikiran Islam (Azra, 2004). Bahasa Arab digunakan sebagai bahasa surat-menyurat diplomatik kesultanan-kesultanan Islam dan menjadi simbol perlawanan identitas terhadap dominasi bahasa serta budaya penjajah Barat (Merle Calvin Ricklefs, 2008). Bahkan yang paling menarik adalah bahwa aksara Arab pernah menjadi aksara utama masyarakat Indonesia untuk menuliskan urusan sehari-hari yang terlihat pada penulisan nisan kuno, arsitektur masjid, dan naskah kuno dalam bentuk Arab Jawi/Pegon (Tjandrasasmita, 2009). Fenomena ini mempertegas bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang dipraktikkan di Indonesia. Secara kultural, bahasa Arab memiliki legitimasi simbolik dan historis yang kuat di tengah masyarakat Indonesia. Namun, legitimasi simbolik tersebut tidak institusional yang memadai dalam sistem pendidikan nasional.

Konfigurasi kebijakan pendidikan nasional di Indonesia memperlihatkan adanya diferensiasi posisi antar bahasa. Bahasa Indonesia ditempatkan sebagai simbol nasionalisme dan integrasi kebangsaan; bahasa Inggris memperoleh legitimasi yang kuat sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi;

UIN IMAM BONJOL PADANG

dan budaya; sebaliknya, bahasa Arab ditempatkan sebagai bahasa agama Islam (Ridwan et al., 2024). Konfigurasi ini menimbulkan paradoks, di satu sisi, memiliki legitimasi sosial dan historis yang kuat karena dikaitkan dengan agama Islam, yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, bahasa sumber ajaran agama Islam, bahasa ibadah, serta medium intelektual dalam tradisi pendidikan Islam (Rekan et al., 2025). Akan tetapi di sisi lain, posisi tersebut tidak otomatis bertransformasi menjadi legitimasi struktural dalam sistem pendidikan nasional.

Paradoks tersebut tampak pada cara bahasa Arab dikonstruksi dalam kebijakan pendidikan nasional. Bahasa Arab lebih banyak diposisikan sebagai bagian dari pendidikan keagamaan dan dilembagakan terutama pada madrasah, pesantren, atau program studi keislaman, sedangkan sekolah umum relatif terbatas dan tidak memperoleh prioritas strategis sebagaimana bahasa Inggris. Regulasi pendidikan nasional mewajibkan bahasa Inggris diajarkan di seluruh satuan pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi di bawah Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi maupun di bawah naungan Kementerian Agama dengan intensitas lebih tinggi daripada bahasa Arab (Ismi Yulizar & Siti Aminah, 2022). Dalam berbagai praktik pendidikan, bahasa Arab cenderung direduksi menjadi instrumen pemahaman teks keagamaan, bukan sebagai alat komunikasi global, bahasa ilmu pengetahuan, atau bahasa strategis internasional. Padahal, bahasa Arab merupakan bahasa resmi PBB yang digunakan secara luas di kawasan internasional dan memiliki posisi penting dalam diplomasi, ekonomi, migrasi tenaga kerja, maupun studi kawasan Timur Tengah.

Kondisi di atas menunjukkan adanya kontradiksi dalam politik bahasa Arab di Indonesia. Literatur internasional menegaskan pentingnya bahasa Arab dalam pendidikan global, terutama dalam pengembangan kajian Timur Tengah, Islamic Studies, ekonomi, diplomasi dan industri halal, tetapi kebijakan nasional justru menempatkannya sebagai bahasa hierarki kedua bahkan ketiga setelah bahasa Inggris. Bahasa Arab mendapatkan legitimasi simbolik yang tinggi sebagai bahasa agama, tetapi belum sepenuhnya memperoleh legitimasi institusional yang setara dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini memperlihatkan kontradiksi yang sangat tajam, di mana bahasa Arab dibutuhkan secara strategis dalam berbagai bidang,

UIN IMAM BONJOL PADANG

tetapi kebijakan faktual justru bersifat marginalisasi struktural. Artinya, posisi bahasa Arab tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan pedagogis, melainkan sebagai persoalan politik bahasa yang mempunyai kaitan dengan bagaimana negara membangun ideologi kebahasaan, mengelola prioritas pendidikan, dan mendistribusikan legitimasi terhadap berbagai bahasa dalam ruang pendidikan.

Negara juga membangun ideologi kebahasaan nasional melalui kebijakan pendidikan *(language management)* yang tidak menunjukkan kesesuaian dengan ideologi dan praktik bahasa masyarakat Indonesia. Negara yang mempunyai penduduk Muslim terbesar tidak menganggap masyarakatnya mempunyai keyakinan terhadap bahasa Arab (*language beliefs*) yang kuat, padahal berbagai praktik (*language practices*) pendidikan dan berbagai kegiatan keagamaan menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab sangat kuat dalam struktur kultural sosial, karena bahasa Arab bukan bahasa yang tabu, tetapi bahasa yang melekat dalam sistem keagamaan masyarakat dan mempunyai ikatan historis bagi masyarakat Indonesia. Wujud legalisasi adalah regulasi yang kemudian diinterpretasikan menjadi praktik, yaitu bagaimana bahasa digunakan (Aksan, 2022). Mempelajari bahasa Arab tidak menjadikan masyarakat Indonesia kaget; tidak mesti diposisikan pada aspek keagamaan, karena memahami bahasa Arab tersebut nantinya akan mengantarkan pada pergaulan internasional yang menguntungkan pada berbagai sektor, terutama pada hubungan diplomatik, pendidikan dan ekonomi.

Kebijakan pendidikan sebagai produk politik mengedepankan bahasa Inggris dalam pendidikan nasional secara menyeluruh dan bahasa Arab hanya pada pendidikan agama Islam. Akibatnya, politik bahasa nasional belum bekerja secara integratif dalam mengatur bahasa asing. Politik bahasa mempunyai tiga dimensi, yaitu dimensi praktik, dimensi ideologi, dan dimensi manajemen bekerja integratif (Bernard Spolsky, 2006). Artinya, politik bahasa seharusnya menata praktik yang sudah ada yang berfragmentasi menjadi keyakinan bahasa masyarakat (*language beliefs*) terhadap bahasa Arab dengan regulasi (*language management),* tanpa membedakan antara keduanya. Bahasa dipraktikkan karena mengandung nilai

UIN IMAM BONJOL PADANG

yang melekat pada suatu masyarakat yang kemudian berfragmentasi menjadi ideologi, kemudian diatur, ditata, dan dilegalisasi sebagai aspek legal-administratif.

Negara membuat kebijakan pendidikan selain menetapkan tujuan, proses dan output, juga menitipkan kepentingan ideologis sebagai jalan untuk mengatur pikiran warganya (Oke & Olajimbiti, 2021). Indonesia merupakan negara yang unik dalam melaksanakan pendidikan nasional karena diselenggarakan oleh dua kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, dengan payung hukum yang sama, yaitu UU 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut belum mengatur pendidikan bahasa asing secara adil karena menata pendidikan bahasa asing dengan mengeliminasi salah satu bahasa asing dan mendukung yang lain (Alhendi & Baniamer, 2024). Ketimpangan tersebut terlihat pada penempatan pembelajaran bahasa asing, di mana bahasa Inggris diajarkan pada semua lembaga pendidikan nasional, baik di bawah Kementerian Pendidikan Nasional maupun Kementerian Agama, dan bahasa Arab hanya diajarkan pada lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama. Anehnya lagi, pada lembaga pendidikan agama Islam, negara mewajibkan bahasa Inggris dan bahasa Arab, tetapi porsi bahasa Inggris lebih besar daripada bahasa Arab. Dalam hal ini, negara tidak mengedepankan aspek keadilan linguistik karena memandang salah satu bahasa unggul dibandingkan dengan bahasa lainnya (*linguicisme)*.

Fakta di atas, tentunya memberikan berbagai implikasi terhadap lembaga pendidikan dan perangkat-perangkat yang menjalankannya. Implikasi pertama adalah bahwa pelaksanaan pendidikan, mulai dari kementerian sampai kepada institusi pendidikan terkecil (ruang kelas), mengikuti amanat dari peraturan perundang-undangan, harus mengedepankan bahasa Inggris. Implikasi yang kedua adalah dukungan yang didapatkan oleh bahasa itu sendiri menjadi timpang baik moral maupun materiil, implikasi yang ketiga adalah dukungan finansial terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan bahasa itu sendiri, dan implikasi yang keempat adalah terpinggirkannya bahasa Arab pada ranah yang marginal. Ruang kelas sudah diwarnai oleh bahasa Inggris karena orang akan mempelajarinya,

UIN IMAM BONJOL PADANG

dengan keyakinan bahwa mempelajarinya merupakan simbol kemajuan. Secara moral, orang yang menggunakan bahasa Inggris akan merasa bangga, berbeda dengan bahasa Arab yang akan dianggap sebagai bahasa agama yang sakral. Karena bahasa Inggris adalah bahasa maju, maka berbagai perlombaan dan kreativitas akan muncul sebagai bentuk ekspresi modernitas, dan bahasa Arab akan menjadi bahasa agama yang tidak mendapatkan tempat.

Negara mampu menguasai masyarakat melalui bahasa dengan berbagai unsur kuasanya. Bahasa dapat menjadi instrumen dalam memperluas kekuasaan politik yang tidak dapat dilihat oleh mata (Elizabeth Sherman Swing, 1980). Bahkan, bahasa merupakan instrumen kekuasaan yang paling halus namun paling efektif dalam membentuk cara berpikir, struktur sosial, dan orientasi ideologi pada suatu masyarakat (Norman Fairclough, 1989). Bahasa tidak hanya menjadi medium komunikasi, tetapi juga arena artikulasi ideologi dan kontrol sosial (Spolsky, 2004). Karena bahasa adalah ikatan ideologi, kebijakan bahasa selalu memuat relasi kuasa antara kelompok dominan dan subordinat untuk menentukan legitimasi simbolik. Dengan demikian, politik bahasa bukan semata kebijakan linguistik, tetapi ekspresi dari perbuatan otoritas epistemik tentang siapa yang berkuasa, maka bahasanya yang digunakan.

Berbagai fakta dan fenomena di atas tidak menjadikan kajian terkait dengan bahasa Arab bertransformasi pada aspek-aspek politik dan kebijakan. Penelitian mengenai bahasa Arab masih didominasi oleh perspektif pedagogis mulai dari aspek media pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, kompetensi kebahasaan, motivasi belajar, maupun hasil dan evaluasi pembelajaran. Kajian terkait dengan politik bahasa terfokus dan menyoroti bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan dominasi bahasa Inggris dalam pendidikan, sementara bahasa Arab sering kali diperlakukan secara periferal sebagai bagian dari pendidikan agama Islam dan bukan sebagai objek kajian kebijakan bahasa secara independen. Kajian yang melihat bahasa Arab dari aspek kebijakan dan politik dalam sistem pendidikan nasional masih sangat terbatas.

Beberapa penelitian tentang politik bahasa Arab di Indonesia dalam sistem pendidikan nasional sudah ada tetapi masih belum fokus. Penelitian Mauidlotun

UIN IMAM BONJOL PADANG

Nisa (2018) menjelaskan bahwa afirmatif politik berupa kebijakan terhadap bahasa Arab belum setara dengan bahasa asing lainnya dalam sistem pendidikan nasional (Mauidlotun Nisa', 2018). Kamusella (2020) melihat bahwa kebijakan pendidikan nasional Indonesia masih diwarnai oleh paham kolonialisme yang lebih mengakomodasi bahasa-bahasa Eropa Barat dan destruktif terhadap bahasa Arab (Kamusella, 2020). Bahasa Arab diatur dalam domain agama Islam untuk memenuhi tuntutan spiritualitas dan kebutuhan literasi Islam masyarakat Muslim, tidak untuk dikembangkan sebagai tuntutan global (M. O. Hamid & Ali, 2021). Bahasa Arab dalam politik dijadikan sebagai komoditas politik identitas untuk mendapatkan dukungan, sekaligus menjaga hubungan dengan negara penutur bahasa (Gautam, 2022). Kebijakan yang ada masih cenderung hanya untuk mengendalikan opini masyarakat Muslim supaya tidak liar (Djennane, 2023). Karena kebijakan politik yang tidak serius terhadap bahasa Arab, kemudian terjebak dalam konflik ideologi antara nasionalisme, lokalitas, dan isu globalisasi (Jose, 2023).

Para peneliti belum sadar bahwa keberadaan bahasa Arab dalam sistem pendidikan nasional Indonesia saat ini adalah hasil dari kerja politik bahasa. Ideologi (*language beliefs*) negara terhadap bahasa akan membentuk kebijakan pendidikan (*language* manag*ement). K*ebijakan tersebut dimanifestasikan dalam pengelolaan pendidikan dan praktik kebahasaan yang berlangsung dalam institusi pendidikan. Ketiga dimensi ini merupakan komponen penting memahami politik bahasa secara komprehensif. Akibatnya, dinamika ideologis, regulatif, dan implementasi yang membentuk posisi bahasa Arab belum terpetakan secara sistematis. Negara membuat jalannya sendiri, yaitu ideologi negara ditanamkan melalui regulasi kebijakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, bahasa daerah adalah bahasa lokal dan budaya, sedangkan bahasa Inggris adalah bahasa kemajuan, dan bahasa Arab adalah bahasa agama. Ideologi ini diyakini oleh masyarakat pendidikan untuk dipelajari sampai mendapatkan kompetensi kebahasaan dan dipraktikkan sebagai kewajiban. Konsepsi ini terus-menerus berjalan dan berulang-ulang membentuk realitas bahasa Arab hingga saat ini.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Penelitian-penelitian terdahulu di atas telah berhasil mengidentifikasi permasalahan struktural politik bahasa Arab di Indonesia, *political will* negara terhadap bahasa Arab yang lemah, karena kebijakan masih warisan kolonial, bahasa Arab ditempatkan untuk memenuhi tuntutan spiritual, dan sebagai alat politik untuk mengendalikan opini publik, serta politik perebutan kepentingan nasional, lokal, dan global. Secara keseluruhan, penelitian tersebut berbicara pada ranah yang parsial dari kebijakan politik bahasa dan belum melihat cara kerja kebijakan tersebut secara nyata pada ranah pendidikan. Penelitian yang secara khusus menganalisis politik bahasa Arab dalam sistem pendidikan nasional melalui perspektif *language policy* masih sangat terbatas. Penelitian yang mengintegrasikan hubungan antara *language beliefs, language management*, dan *language practices* dalam membaca posisi bahasa Arab dalam sistem pendidikan nasional Indonesia belum ada. Akibatnya, dinamika ideologis, regulatif, dan implementatif yang membentuk posisi bahasa Arab belum ditemukan.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan bahasa yang dikembangkan oleh Bernard Spolsky. Pandangan Spolsky terhadap kebijakan bahasa merupakan interaksi antara tiga dimensi utama, yaitu *language beliefs* (ideologi atau keyakinan tentang bahasa), l*anguage management* (pengelolaan dan regulasi bahasa), dan *language prac*tices (praktik penggunaan bahasa). Perspektif ini dipilih karena memungkinkan untuk membaca bahasa Arab tidak hanya pada level kebijakan formal saja, tetapi juga akan menjelaskan relasi ideologi negara terhadap bahasa Arab, bentuk pengelolaan bahasa Arab dalam sistem pendidikan nasional, dan implementasinya dalam ruang pendidikan.

Penelitian ini akan berupaya menganalisis cara kerja politik bahasa dari berbagai regulasi pendidikan dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia yang membentuk posisi bahasa Arab. Bahasa Arab akan dilihat dalam setiap regulasi untuk menganalisis dimensi manajemen bahasa, ideologi bahasa dan praktik bahasa Arab yang diinginkan negara dalam pendidikan nasional. Penelitian ini tidak hanya memposisikan bahasa Arab sebagai mata pelajaran atau instrumen pembelajaran, melainkan sebagai objek kebijakan bahasa yang diproduksi melalui

UIN IMAM BONJOL PADANG

relasi antara ideologi negara, regulasi pendidikan, dan praktik institusional. Dengan demikian, penelitian ini akan berkontribusi dalam merumuskan kerangka politik bahasa Arab dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia yang berpijak pada jalur politisasi bahasa dengan mengikuti ideologi masyarakat, bukan mengidiologisasikan masyarakat. Tujuannya adalah supaya terjadi keseimbangan antara nasionalisme, religiusitas, dan globalisme kebahasaan. Secara praktis, penelitian ini akan berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan bahasa Arab yang lebih proporsional dan strategis di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Politik bahasa Arab merupakan kajian yang sangat menarik untuk diulas dan dipahami untuk dijadikan pengetahuan dan dasar pikir politik bahasa Arab di Indonesia. Melalui pengetahuan tentang kebijakan bahasa, dapat dilihat kedudukan bahasa Arab secara politik dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hajat hidup masyarakat tanpa berpihak pada satu bahasa tertentu. Adanya kecenderungan pemerintah berpihak pada salah satu bahasa asing yang ada di Indonesia dan terorganisir secara sistematis dalam pendidikan nasional adalah bentuk politisasi bahasa yang tidak netral. Netralitas pada kebijakan politik adalah bentuk tidak adil pendidikan bahasa, khususnya bahasa Arab, yang hanya ditempatkan pada ranah pendidikan agama. Padahal, sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam.

Bahasa Inggris yang dilegitimasi melalui regulasi dan dijalankan dalam sistem pendidikan nasional (pendidikan umum dan agama) akan berkembang pesat, dan bahasa Arab yang dilegitimasi hanya pada ranah pendidikan agama Islam akan berkembang pada bidang itu saja. Manajemen bahasa dan praktik bahasa yang ada pada hari ini di berbagai lembaga pendidikan merupakan perintah undang-undang pendidikan yang ambivalen, mendukung bahasa Arab pada pendidikan Islam secara sepihak dan bahasa Inggris secara total dalam pendidikan nasional. Praktik bahasa dalam pendidikan yang terus-menerus akan melahirkan keyakinan pada masyarakat Indonesia bahwa bahasa Inggris lebih penting dan harus diutamakan. Tercipta sistem keyakinan bahasa tersebut menjadi sebuah kebenaran dalam kehidupan

UIN IMAM BONJOL PADANG

masyarakat sehingga membentuk suasana kebatinan bahasa bahwa bahasa Inggris harus dipelajari dengan sungguh-sungguh.

Bahasa asing yang didukung pemerintah melalui peraturan perundang-undangan akan melahirkan kewajiban terhadap dukungan moral, material, dan finansial dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Proses politik yang menghasilkan kebijakan dan membentuk realitas adalah wujud yang pasti dalam pendidikan. Maka dari itu, untuk menganalisis dan membedah problematika tersebut dibuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen bahasa Arab (*language management*) dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi keyakinan (ideologi) bahasa Arab (*language beliefs)* dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia?
3. Bagaimana praktik bahasa Arab (*language practices*) yang terimplementasi dari kebijakan pendidikan nasional di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis:

1. Politik bahasa Arab pada dimensi manajemen bahasa (*language management*) dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Politik bahasa Arab dilihat pada regulasi pendidikan secara nasional mulai dari regulasi makro, meso dan mikro (khusus). Banyak regulasi yang menjadi objek penelitian ini, sehingga perlu dianalisis secara mendalam bagaimana pola manajemen bahasa yang dibuat oleh negara.
2. Politik bahasa Arab pada dimensi keyakinan bahasa (*Language beliefs)* dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Artinya, menggali dimensi ideologis (apa yang diyakini dan diidealkan) oleh negara terhadap bahasa Arab. *Language beliefs* hasil dari kerja kekuasaan politik melalui kebijakan berupa peraturan perundang-undangan *(language management*) menjadi Sistem Pendidikan Nasional.
3. Politik bahasa Arab pada dimensi praktik bahasa Arab (*language practices)* dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Dimensi praktik ini dilihat

UIN IMAM BONJOL PADANG

dari dua kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama.

Dari tujuan penelitian diatas, penelitian ini akan memberikan pengetahuan tentang politik bahasa Arab dalam sistem pendidikan nasional dari dimensi manajemen bahasa (*language management*), keyakinan bahasa (*language beliefs*), dan praktik bahasa (*language practice*).

D. Urgensi Penelitian

Penelitian tentang politik bahasa Arab dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia sangat penting. Penelitian ini akan memotret politik bahasa nasional melalui berbagai regulasi pendidikan, regulasi yang membentuk ideologi bahasa, dan amanat regulasi tersebut diimplementasikan di lembaga pendidikan. Bahasa Arab bukan sekadar bahasa agama Islam, melainkan juga bahasa ilmu, budaya, dan peradaban yang memiliki kontribusi historis dalam pembentukan sistem pendidikan Islam di Nusantara. Namun demikian, posisi bahasa Arab dalam kebijakan pendidikan nasional hingga kini masih tarik-menarik antara kepentingan politik, ideologi nasional, dan kebutuhan masyarakat religius. Urgensi penelitian ini juga terletak pada kebutuhan untuk menyusun rekonstruksi politik dan kebijakan terhadap bahasa Arab dalam pendidikan nasional. Melalui analisis terhadap *language management, language beliefs,* dan *language practices,* penelitian ini akan mengungkap bagaimana perubahan orientasi politik bahasa Arab di Indonesia. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi perumusan kebijakan bahasa yang lebih adil dan kontekstual.

Secara konseptual, penelitian ini memperkaya wacana politik bahasa dalam konteks negara multibahasa dan multi ideologi seperti Indonesia. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi pembuat kebijakan, lembaga pendidikan Islam, dan akademisi untuk meneguhkan kedudukan bahasa Arab sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Bahasa Arab tidak hanya menjadi simbol keagamaan Islam, tetapi seharusnya menjadi instrumen pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan bangsa. Dengan demikian, penelitian ini mendesak dilakukan untuk menjawab kesenjangan teori dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

kebijakan dalam memahami peran dan nasib bahasa Arab di bawah rezim politik pendidikan nasional, sekaligus membangun landasan ilmiah bagi arah politik bahasa Arab yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena bahasa Arab dalam sistem pendidikan nasional Indonesia terus berada dalam dinamika antara kepentingan religius, orientasi globalisasi, kebijakan pendidikan nasional, dan politik identitas. Di tengah meningkatnya arus globalisasi dan dominasi bahasa asing tertentu dan dominasi bahasa asing tertentu dalam sistem pendidikan, kajian mengenai posisi bahasa Arab menjadi penting untuk memahami bagaimana negara membangun kebijakan bahasa yang adil dan akomodatif. Penelitian ini penting untuk memotret bahasa nasional melalui regulasi pendidikan, ideologi bahasa, dan implementasi di lembaga pendidikan. Bahasa Arab tidak hanya bicara agama, tetapi juga bahasa ilmu, budaya, dan peradaban. Posisi bahasa Arab masih tarik menarik antara kepentingan politik, ideologi nasional, dan kebutuhan religius masyarakat. Analisis tiga dimensi ini akan mengungkap perubahan orientasi politik bahasa Arab dan memberikan kontribusi konseptual serta praktis bagi perumusan kebijakan bahasa yang lebih adil dan kontekstual.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori *politik bahasa*, khususnya dalam konteks kebijakan bahasa Arab di Indonesia. Analisis manajemen bahasa, ideologi bahasa, dan praktik bahasa dalam kebijakan pendidikan akan menambah pemahaman tentang bagaimana politik berperan dan bekerja membentuk bahasa Arab sesuai keinginan penguasa. Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai interaksi antara kebijakan bahasa negara dan dinamika globalisasi, religiusitas, serta nasionalisme. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya pemahaman mengenai peran bahasa Arab dalam sistem pendidikan Indonesia, baik sebagai bahasa keagamaan maupun sebagai bahasa akademik, serta memperluas kajian tentang *Language Policy and Planning (LPP)* yang relevan dengan konteks Indonesia.

UIN IMAM BONJOL PADANG

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengambil kebijakan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) serta Kementerian Agama (Kemenag) dalam merumuskan kebijakan bahasa yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan pendidikan nasional dengan mempertimbangkan hak dan kebutuhan keagamaan penduduknya yang sebagian besar beragama Islam. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa ilmiah, serta mengurangi ketimpangan antara sektor pendidikan agama dan pendidikan umum. Selain itu, penelitian ini dapat membantu dalam penyusunan kurikulum pendidikan bahasa Arab yang lebih relevan dengan tuntutan global, tanpa mengabaikan nilai-nilai keagamaan yang menjadi akar bahasa ini.

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini juga memiliki manfaat sosial, terutama dalam memperkuat pemahaman mengenai pentingnya keadilan linguistik dalam sistem pendidikan Indonesia. Dengan membahas peran bahasa Arab sebagai bahasa keagamaan sekaligus bahasa ilmiah, penelitian ini dapat membuka wawasan masyarakat tentang pentingnya memposisikan bahasa Arab dalam kerangka pendidikan yang lebih luas. Di sisi lain, penelitian ini juga diharapkan dapat memfasilitasi terbentuknya masyarakat yang lebih toleran dan terbuka terhadap berbagai bahasa dan budaya, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembentukan masyarakat Indonesia yang lebih inklusif. Negara Indonesia akan sampai pada cita-cita pendirinya sebagai bangsa yang besar di mata dunia dan menjadi negara yang multi bahasa sebagai warga negara dan warga dunia.

4. Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi dunia akademik, khususnya dalam bidang pendidikan bahasa, politik bahasa, dan kebijakan pendidikan. Dengan mengkaji kebijakan bahasa Arab dalam konteks pendidikan nasional di Indonesia, penelitian ini menjadi referensi penting bagi para akademisi yang tertarik untuk mengembangkan kajian tentang hubungan

UIN IMAM BONJOL PADANG

antara bahasa, kebijakan pendidikan, dan identitas budaya dalam sistem pendidikan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai penerapan kebijakan bahasa di negara-negara dengan sistem pendidikan yang serupa. Setiap negara mempunyai problematika sendiri dalam mengatur penggunaan bahasa. Pertarungan ideologi negara, agama dan globalisme menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan bahasa. Negara mempunyai kepentingan untuk mengatur hubungan warga negaranya dengan ideologi negaranya. Negara juga tidak boleh mengabaikan kebutuhan keagamaan penduduknya, serta negara harus melihat dan mampu menempatkan diri sebagai warga dunia yang sudah serba terbuka dengan berbagai akses.

UIN IMAM BONJOL
PADANG